

LOKAKARYA HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DESA PARAGE KECAMATAN CIKULUR KABUPATEN LEBAK

Fatari¹, Suandi Silalahi², Rani Sri Sumarsih³, Sabrawijaya⁴, Udin Suadma⁵, Basrowi⁶,
Sulkiah Hendrawati⁷

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

⁷ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang Jakarta KM. 03 No. 1.B (Pakupatan), Kota Serang Banten Indonesia

fatari.binabangsa@gmail.com

(*) Corresponding Author

Abstract

Community service result workshops are one of the important mechanisms for evaluating and disseminating community empowerment programs while formulating sustainable follow-up actions at the village level. The community service program in Parage Village, Cikulur District, Lebak Regency, was implemented using a participatory approach involving the village government, community members, religious leaders, entrepreneurs, youth groups, community organizations, and higher education institutions. The program focused on five major areas: (1) education and religious activities, (2) community economic and MSME empowerment, (3) socio-cultural and legal development, (4) environmental sustainability, and (5) village governance. The implementation methods consisted of observation, needs assessment, program planning, implementation, mentoring, documentation, and a final workshop. The results indicate that an integrated cross-sectoral approach provided opportunities for community members to participate in identifying local problems and developing village potentials. In the education and religious sector, activities focused on strengthening learning capacity and religious values. In the economic and MSME sector, the program encouraged improvements in business management, marketing, and product development. The socio-cultural and legal program emphasized legal awareness and the preservation of local social and cultural values. Environmental activities promoted public awareness of cleanliness and sustainable environmental management. Meanwhile, the village governance program focused on participation, transparency, communication, and accountability. The workshop produced recommendations emphasizing that community empowerment should not be limited to short-term activities but should be continued through regular mentoring and collaboration among higher education institutions, village government, communities, businesses, and other stakeholders.

Keywords: Workshop, Community Service, Community Empowerment, Parage Village, MSMEs, Village Governance.

Abstrak

Lokakarya hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk evaluasi dan diseminasi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menyampaikan hasil kegiatan sekaligus merumuskan keberlanjutan program di tingkat desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, pemuda, kelompok masyarakat, serta perguruan tinggi. Program pengabdian difokuskan pada lima bidang utama, yaitu (1) pendidikan dan keagamaan, (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, (3) sosial budaya dan hukum, (4) lingkungan hidup, dan (5) tata kelola pemerintahan desa. Metode pelaksanaan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, dokumentasi, serta lokakarya hasil kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan lintas bidang mampu memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan potensi desa. Pada bidang pendidikan dan keagamaan, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas belajar dan penguatan nilai keagamaan. Pada bidang ekonomi dan UMKM, kegiatan mendorong peningkatan kemampuan pengelolaan usaha, pemasaran, dan pengembangan produk. Bidang sosial budaya dan hukum diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum serta penguatan nilai sosial dan budaya lokal. Bidang lingkungan hidup

mendorong kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Sementara itu, bidang tata kelola pemerintahan desa diarahkan pada peningkatan partisipasi, transparansi, komunikasi, dan akuntabilitas. Lokakarya menghasilkan rekomendasi agar program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan jangka pendek, tetapi dilanjutkan melalui pendampingan dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kata kunci: Lokakarya, Pengabdian kepada Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Parage, UMKM, Tata Kelola Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, kehidupan sosial budaya, kelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan pembangunan desa yang berorientasi pada masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. (Handayani et al., 2023; Utami et al., 2022)

Pendekatan partisipatif menjadi penting karena keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam mengidentifikasi persoalan, menyusun prioritas, mengambil keputusan, dan mengelola hasil pembangunan. Penelitian mengenai pembangunan perdesaan berbasis masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan desa perlu memperhatikan konteks lokal, kearifan lokal, struktur sosial, aktivitas ekonomi, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. (Utami et al., 2022; Yudarwati & Gregory, 2022)

Partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan desa. Handayani et al. menunjukkan adanya hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik, persepsi masyarakat, partisipasi, dan kinerja pelayanan pemerintahan desa. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan secara terpadu antara pembangunan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan desa. (Handayani et al., 2023; Putri et al., 2023)

Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak memiliki potensi masyarakat yang dapat dikembangkan melalui berbagai bidang. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang tidak hanya berorientasi pada satu persoalan, tetapi mencakup lima bidang strategis, yaitu pendidikan dan keagamaan; pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM; sosial budaya dan hukum; lingkungan hidup; serta tata kelola pemerintahan desa. (Utami et al., 2022; Tou et al., 2023)

Kegiatan tersebut kemudian dipresentasikan melalui Lokakarya Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Desa Parage sebagai forum untuk mengevaluasi kegiatan, mendiseminasikan hasil, menerima masukan

masyarakat, serta merumuskan program keberlanjutan. (Yudarwati & Gregory, 2022)

Yudarwati dan Gregory menegaskan bahwa komunikasi pembangunan yang partisipatif dapat mendorong masyarakat menjadi aktor utama pembangunan dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program yang dilaksanakan. (Yudarwati & Gregory, 2022; Utami et al., 2022)

Oleh karena itu, lokakarya tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai forum refleksi dan perencanaan bersama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. (Yudarwati & Gregory, 2022; Handayani et al., 2023)

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. mendiseminasikan hasil program pengabdian kepada masyarakat di Desa Parage;
2. mengevaluasi pelaksanaan lima bidang program kerja;
3. mengidentifikasi manfaat dan kendala program;
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
5. menyusun rekomendasi keberlanjutan program;

membangun sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan individu dan kelompok agar mampu mengenali potensi, menyelesaikan persoalan, mengambil keputusan, serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks pembangunan perdesaan, pemberdayaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik lokal. (Utami et al., 2022; Farida & Qabandiya, 2022)

Utami et al. menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif dan co-design dapat memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. (Utami et al., 2022)

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu ditempatkan sebagai mitra dalam proses pembangunan. Perguruan tinggi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengembangkan kapasitasnya. (Utami et al., 2022; Yudarwati & Gregory, 2022)

Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks masyarakat desa, pendidikan tidak hanya dilakukan melalui lembaga formal, tetapi juga melalui kegiatan nonformal dan informal. (Gumono et al., 2022)

Penelitian tentang pendidikan masyarakat menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kegiatan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat. (Gumono et al., 2022)

Sementara itu, aktivitas keagamaan dapat menjadi bagian penting dari penguatan modal sosial masyarakat. Studi mengenai keterlibatan masyarakat di wilayah perdesaan Indonesia menunjukkan bahwa kelompok berbasis keagamaan dapat berhubungan dengan berbagai bentuk keterlibatan sosial dan kemasyarakatan. (Utami et al., 2022; Yudarwati & Gregory, 2022)

Oleh karena itu, program pendidikan dan keagamaan di Desa Parage diarahkan untuk membangun sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai moral, sosial, dan spiritual masyarakat. (Gumono et al., 2022; Utami et al., 2022)

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UMKM

UMKM memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Digitalisasi memberikan peluang kepada UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan promosi, dan memperbaiki keberlanjutan usaha. (Gao et al., 2023; Nugraha et al., 2022)

Gao et al. menemukan bahwa penggunaan e-commerce dan digital marketing berkaitan dengan kinerja finansial dan keberlanjutan UMKM. (Gao et al., 2023)

Selain pemasaran, literasi digital juga penting bagi masyarakat perdesaan. Marsdenia menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat dapat mendukung ketahanan ekonomi dan pemanfaatan peluang ekonomi berbasis digital. (Marsdenia, 2022; Nugraha et al., 2022)

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi Desa Parage diarahkan pada penguatan kemampuan usaha, pemasaran, inovasi, literasi

keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital. (Gao et al., 2023; Marsdenia, 2022)

Sosial Budaya dan Hukum

Pembangunan desa perlu mempertimbangkan karakter sosial dan budaya masyarakat. Kearifan lokal dapat menjadi modal sosial dalam membangun kesepahaman dan memperkuat ketahanan masyarakat. (Tou et al., 2023; Utami et al., 2022)

Kajian mengenai pembangunan perdesaan berbasis masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan dalam membangun modal sosial serta membantu menciptakan kesepakatan antarpemangku kepentingan. (Tou et al., 2023)

Di sisi lain, literasi hukum diperlukan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Nugraha dan Pratama menunjukkan bahwa masyarakat desa sering kali telah memiliki pengetahuan dasar hukum, tetapi masih membutuhkan pendampingan agar mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Nugraha & Pratama, 2023; Tjut Nyak Dhien, 2024)

Dengan demikian, program sosial budaya dan hukum diarahkan pada penguatan solidaritas masyarakat, pelestarian nilai lokal, peningkatan kesadaran hukum, dan kemampuan masyarakat menyelesaikan persoalan secara musyawarah. (Nugraha & Pratama, 2023; Tou et al., 2023)

Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pembangunan desa berkelanjutan. Pemberdayaan lingkungan perlu dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, serta keterlibatan masyarakat. (Zikargae et al., 2022; Utami et al., 2022)

Zikargae et al. menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan berbasis kegiatan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta mendorong partisipasi dalam peningkatan kualitas lingkungan. (Zikargae et al., 2022)

Pendekatan partisipatif juga penting dalam pengelolaan sumber daya lingkungan karena keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan pengetahuan lokal. (Utami et al., 2022; Zikargae et al., 2022)

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa yang baik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan sistem informasi yang memadai. (Handayani et al., 2023; Putri et al., 2023)

Putri et al. menunjukkan bahwa tata kelola desa berkaitan dengan pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan. (Putri et al., 2023)

Purnamasari et al. juga menunjukkan bahwa pengendalian internal dan penerapan sistem informasi memiliki hubungan positif dengan akuntabilitas kinerja desa dan pembangunan perdesaan berkelanjutan. (Purnamasari et al., 2024)

Karena itu, penguatan tata kelola Desa Parage perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, administrasi desa, dan akuntabilitas pembangunan. (Handayani et al., 2023; Purnamasari et al., 2024)

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut program. (Utami et al., 2022; Farida & Qabandiya, 2022)

Pendekatan tersebut dipilih karena pengembangan masyarakat yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak eksternal. Model pembelajaran partisipatif juga telah digunakan dalam pengembangan masyarakat desa di Indonesia melalui proses observasi, forum, wawancara, dan co-design. (Utami et al., 2022; Yudarwati & Gregory, 2022)

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan terdiri atas:

Observasi dan identifikasi

Tim melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat, potensi desa, dan permasalahan yang menjadi prioritas. (Utami et al., 2022)

Pemetaan kebutuhan

Hasil observasi digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pada lima bidang program.

Perencanaan program

Tim bersama pemerintah desa dan masyarakat menyusun kegiatan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. (Utami et al., 2022)

Implementasi

Program dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, edukasi, kegiatan sosial, dan kegiatan lingkungan. (Farida & Qabandiya, 2022; Zikargae et al., 2022)

Monitoring dan evaluasi

Setiap kegiatan dievaluasi berdasarkan partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan kebutuhan, dan manfaat yang dirasakan.

Lokakarya

Lokakarya digunakan sebagai forum untuk menyampaikan hasil, mendapatkan masukan, dan menyusun rencana keberlanjutan. (Yudarwati & Gregory, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang Pendidikan dan Keagamaan

Program pertama berfokus pada bidang pendidikan dan keagamaan. Program diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai moral dan keagamaan masyarakat. (Gumono et al., 2022; Utami et al., 2022)

Bentuk kegiatan

Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. pendampingan belajar anak-anak;
2. peningkatan motivasi belajar;
3. kegiatan literasi;
4. edukasi penggunaan teknologi secara positif;
5. kegiatan keagamaan;
6. pendampingan kegiatan pengajian;
7. penguatan pendidikan karakter;
8. kegiatan keagamaan bersama masyarakat.

Program pendidikan tidak hanya diarahkan kepada anak-anak, tetapi juga kepada masyarakat secara lebih luas melalui pembelajaran nonformal. (Gumono et al., 2022)

Pendekatan tersebut relevan dengan temuan bahwa program pendidikan masyarakat berbasis kegiatan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. (Gumono et al., 2022)

Sementara itu, kegiatan keagamaan dapat menjadi media untuk membangun interaksi sosial dan memperkuat keterlibatan masyarakat. (Utami et al., 2022; Yudarwati & Gregory, 2022)

Hasil

Hasil program menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan dan keagamaan dapat menjadi ruang interaksi antara mahasiswa/perguruan tinggi, masyarakat, anak-anak, tokoh agama, dan pemerintah desa. Program juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar dan penguatan nilai sosial-keagamaan. (Gumono et al., 2022; Utami et al., 2022)

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UMKM

Program kedua diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM. UMKM merupakan salah satu potensi penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa. (Gao et al., 2023; Nugraha et al., 2022)

Bentuk kegiatan

Program meliputi:

1. identifikasi UMKM;
2. edukasi kewirausahaan;
3. pelatihan manajemen usaha;
4. pemasaran digital;
5. pemanfaatan media sosial;
6. peningkatan kualitas kemasan;
7. branding produk;
8. pencatatan keuangan sederhana;
9. pengembangan inovasi produk;
10. penguatan legalitas usaha.

Digitalisasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM. Penelitian Gao et al. menunjukkan bahwa e-commerce dan digital marketing dapat mendukung kinerja finansial dan keberlanjutan UMKM. (Gao et al., 2023; Nugraha et al., 2022)

Selain itu, literasi digital masyarakat perdesaan dapat memperkuat ketahanan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan peluang pasar digital. (Marsdenia, 2022)

Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya: (Gao et al., 2023; Marsdenia, 2022; Nugraha et al., 2022)

1. pengelolaan usaha;
2. pemasaran melalui media digital;
3. kemasan dan branding;
4. pencatatan keuangan;
5. inovasi produk;
6. legalitas usaha.

Program ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan satu kali, tetapi memerlukan pendampingan secara berkelanjutan. (Gao et al., 2023; Nugraha et al., 2022)

Bidang Sosial Budaya dan Hukum

Program ketiga diarahkan pada penguatan kehidupan sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. (Tou et al., 2023; Nugraha & Pratama, 2023)

Bentuk kegiatan

Kegiatan meliputi:

1. sosialisasi kesadaran hukum;
2. edukasi hak dan kewajiban masyarakat;
3. pencegahan permasalahan sosial;
4. penguatan budaya gotong royong;
5. pelestarian nilai budaya lokal;
6. diskusi sosial kemasyarakatan;
7. edukasi penyelesaian masalah melalui musyawarah.

Program literasi hukum relevan karena masyarakat desa tidak hanya membutuhkan pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga membutuhkan kemampuan menerapkan

pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (Nugraha & Pratama, 2023; Tjut Nyak Dhien, 2024)

Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan diskusi lebih mudah diterima masyarakat karena materi hukum dikaitkan dengan persoalan kehidupan sehari-hari. (Nugraha & Pratama, 2023)

Penguatan sosial budaya juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kohesi masyarakat. Kearifan lokal dapat menjadi sumber nilai yang memperkuat modal sosial dan kesepakatan dalam pembangunan desa. (Tou et al., 2023; Utami et al., 2022)

Bidang Lingkungan Hidup

Program keempat diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup. (Zikargae et al., 2022)

Bentuk kegiatan

Program dapat meliputi:

1. edukasi kebersihan lingkungan;
2. kerja bakti;
3. pemilahan sampah;
4. edukasi pengelolaan sampah rumah tangga;
5. penghijauan;
6. pemanfaatan lingkungan secara produktif;
7. kampanye perilaku hidup bersih;
8. penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pendidikan lingkungan berbasis masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. (Zikargae et al., 2022)

Pendekatan partisipatif juga memungkinkan masyarakat menggabungkan pengetahuan lokal dengan pengetahuan baru yang diperoleh dari kegiatan pengabdian. (Utami et al., 2022; Zikargae et al., 2022)

Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan dan pemeliharaan lingkungan. Kegiatan lingkungan juga dapat menjadi sarana memperkuat gotong royong dan interaksi sosial. (Zikargae et al., 2022)

Namun, keberlanjutan kegiatan lingkungan membutuhkan kelembagaan dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar kegiatan tidak berhenti setelah program pengabdian selesai. (Zikargae et al., 2022; Utami et al., 2022)

Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa

Program kelima diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa Parage. (Handayani et al., 2023; Purnamasari et al., 2024)

Bentuk kegiatan

Kegiatan meliputi:

1. edukasi tata kelola pemerintahan;
2. penguatan administrasi desa;
3. peningkatan keterbukaan informasi;
4. penguatan partisipasi masyarakat;
5. peningkatan komunikasi pemerintah desa dan masyarakat;
6. penguatan akuntabilitas;
7. pemanfaatan teknologi informasi;
8. dokumentasi kegiatan pembangunan desa.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengendalian internal. Putri et al. menempatkan pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai elemen penting dalam tata kelola desa. (Putri et al., 2023; Handayani et al., 2023)

Purnamasari et al. menemukan bahwa pengendalian internal dan penerapan sistem informasi berhubungan positif dengan akuntabilitas kinerja desa dan pembangunan perdesaan berkelanjutan. (Purnamasari et al., 2024)

Selain itu, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan lokal. Studi terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa engagement masyarakat dapat berfungsi melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, mobilisasi modal sosial, dan penyesuaian dengan dinamika budaya lokal. (Handayani et al., 2023; Yudarwati & Gregory, 2022)

Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan terlibat dalam proses pembangunan. (Handayani et al., 2023; Yudarwati & Gregory, 2022)

Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa tidak hanya dipahami sebagai administrasi pemerintahan, tetapi sebagai proses kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. (Handayani et al., 2023; Putri et al., 2023)

LOKAKARYA HASIL PENGABDIAN

Lokakarya menjadi tahap penting untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kelima program. (Yudarwati & Gregory, 2022)

Lokakarya dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

Presentasi hasil

Tim pengabdian mempresentasikan hasil kegiatan dari lima bidang.

Penyampaian pengalaman masyarakat

Perwakilan masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan manfaat, pengalaman, dan kendala yang ditemukan selama kegiatan.

Diskusi dan evaluasi

Peserta mendiskusikan keberhasilan program, hambatan, dan kebutuhan tindak lanjut.

Penyusunan rekomendasi

Rekomendasi disusun secara bersama antara pemerintah desa, masyarakat, dan tim pengabdian.

Rencana keberlanjutan

Program yang memiliki manfaat tinggi diarahkan untuk dilanjutkan oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat dengan dukungan perguruan tinggi. (Utami et al., 2022; Yudarwati & Gregory, 2022)

Pendekatan lokakarya tersebut sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan mendorong rasa kepemilikan terhadap program pembangunan. (Yudarwati & Gregory, 2022)



Gambar 1. Lokakarya desa Parage

SINTESIS HASIL LIMA PROGRAM

Kelima program menunjukkan keterkaitan yang saling memperkuat. (Utami et al., 2022; Handayani et al., 2023)

Bidang	Fokus	Hasil Utama
Pendidikan & Keagamaan	Pendidikan, literasi, karakter, keagamaan	Penguatan kapasitas belajar dan nilai sosial-keagamaan
Ekonomi & UMKM	Kewirausahaan, digital marketing, pembukuan, inovasi	Peningkatan kapasitas usaha dan pemasaran
Sosial Budaya & Hukum	Kesadaran hukum, budaya, gotong royong	Peningkatan kesadaran sosial dan hukum
Lingkungan Hidup	Kebersihan, sampah, penghijauan	Peningkatan kesadaran lingkungan
Tata Kelola Desa	Administrasi, transparansi, partisipasi	Penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat

Model ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, sedangkan perguruan tinggi dan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan penguat kelembagaan. (Utami et al., 2022; Handayani et al., 2023)

KENDALA DAN TANTANGAN

Dalam pelaksanaan program, beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam keberlanjutan kegiatan adalah:

1. keterbatasan waktu pendampingan;
2. perbedaan tingkat pemahaman masyarakat;
3. keterbatasan literasi digital;
4. keterbatasan sumber daya ekonomi;
5. perlunya pendampingan UMKM secara berkala;
6. belum optimalnya dokumentasi dan administrasi program;
7. perlunya penguatan koordinasi antar lembaga;
8. perlunya kesinambungan program setelah kegiatan pengabdian selesai.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengabdian tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan membangun kelembagaan dan keberlanjutan. (Utami et al., 2022; Yudarwati & Gregory, 2022)

Faktor Pendukung

1. Dukungan Pemerintah Desa Parage.
2. Kehadiran narasumber dari Polsek Cikurur.
3. Antusiasme masyarakat dan pelajar.
4. Sarana kegiatan yang memadai.

Faktor Hambatan

1. Waktu seminar yang terbatas.
2. Perbedaan tingkat pemahaman peserta.

Masih adanya anggapan bahwa narkoba hanya menjadi masalah di wilayah perkotaan.

REKOMENDASI KEBERLANJUTAN

Berdasarkan hasil lokakarya, beberapa rekomendasi yang dapat dikembangkan adalah:

Pertama, bidang pendidikan dan keagamaan

Membentuk kegiatan belajar masyarakat secara rutin dan mengintegrasikan pendidikan karakter dengan kegiatan keagamaan. (Gumono et al., 2022; Utami et al., 2022)

Kedua, bidang ekonomi dan UMKM

Membentuk kelompok pendamping UMKM desa, melakukan digitalisasi pemasaran, meningkatkan legalitas produk, dan mengembangkan branding produk lokal. (Gao et al., 2023; Marsdenia, 2022; Nugraha et al., 2022)

Ketiga, bidang sosial budaya dan hukum

Mengembangkan program Desa Sadar Hukum serta memperkuat kegiatan sosial dan pelestarian

budaya lokal. (Nugraha & Pratama, 2023; Tjut Nyak Dhien, 2024; Tou et al., 2023)

Keempat, bidang lingkungan

Membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan memperkuat kegiatan kebersihan serta penghijauan. (Zikargae et al., 2022; Utami et al., 2022)

Kelima, bidang tata kelola

Meningkatkan transparansi informasi desa, pengelolaan administrasi, dokumentasi pembangunan, serta ruang partisipasi masyarakat. (Handayani et al., 2023; Purnamasari et al., 2024; Putri et al., 2023)

Kolaborasi multipihak sangat diperlukan karena pembangunan desa yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Penelitian tentang kolaborasi pemerintahan desa menunjukkan bahwa kesesuaian antara strategi pembangunan, potensi lokal, kelembagaan, dan infrastruktur merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengembangan ekonomi perdesaan. (Utami et al., 2022; Handayani et al., 2023)

KESIMPULAN

Lokakarya hasil pengabdian kepada masyarakat di Desa Parage, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak, menjadi sarana penting untuk mengevaluasi dan mendiseminasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Lima bidang program, yaitu pendidikan dan keagamaan; pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM; sosial budaya dan hukum; lingkungan hidup; serta tata kelola pemerintahan desa, menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat desa membutuhkan pendekatan yang terintegrasi.

Program pendidikan dan keagamaan memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas manusia dan nilai sosial-keagamaan. Program ekonomi dan UMKM mendorong peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi digital. Program sosial budaya dan hukum memperkuat kesadaran hukum serta nilai sosial masyarakat. Program lingkungan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, program tata kelola mendorong transparansi, akuntabilitas, komunikasi, dan partisipasi masyarakat.

Lokakarya menghasilkan kesimpulan bahwa program pengabdian perlu dilanjutkan dalam bentuk pendampingan berkelanjutan. Sinergi antara perguruan tinggi, Pemerintah Desa Parage, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam mewujudkan Desa Parage yang lebih mandiri, produktif, berdaya saing, berbudaya, berkelanjutan, dan memiliki tata kelola yang baik

DAFTAR PUSTAKA

1. Gao, J., Siddik, A. B., Abbas, S. K., Hamayun, M., Masukujjaman, M., & Alam, S. S. (2023). Impact of e-commerce and digital marketing adoption on the financial and sustainability performance of MSMEs during the COVID-19 pandemic: An empirical study. *Sustainability*, 15(2), 1594. <https://doi.org/10.3390/su15021594>
 2. Gumono, G., Sarwono, S., Yulistio, D., Pitawan, K. A., Solihin, M., & Julianto, E. (2022). Development of local wisdom-based thematic teaching materials to improve adaptive cultural literacy. *Community Empowerment*, 7(6), 978–987. <https://doi.org/10.31603/ce.6560>
 3. Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
 4. Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The authority of the village government in the management of village funds during the COVID-19 pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1), 195–222. <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.53646>
 5. Marsdenia. (2022). Digital literacy of rural community to achieve economic resilience: Development of tourism local destination. *Proceedings*, 83(1), 12. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083012>
 6. Nugraha, A., & Pratama, F. A. (2023). Building legal awareness in village communities through the legal literacy program (LLP). *Journal of Community Service in Science and Engineering*, 2(1).
 7. Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech adoption drivers for innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 208. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
 8. Purnamasari, R., Hasanudin, A. I., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2024). Do internal control and information systems drive sustainable rural development in Indonesia? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100242. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100242>
 9. Putri, C. M., Argilés, J., & Ravenda, D. (2023). Creating good village governance: An effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 455–468. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266>
 10. Tjut Nyak Dhien, D. S. (2024). Community empowerment through legal education: Enhancing legal awareness in village communities. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3). <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1680>
 11. Tou, H. J., Noer, M., Helmi, & Lenggogeni, S. (2023). The value of settlement local wisdom in Nagari Pariangan, West Sumatra Province. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(1), 58–67. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.1.58-67>
 12. Utami, L. A., Lechner, A. M., Permanasari, E., Purwandaru, P., & Ardianto, D. T. (2022). Participatory learning and co-design for sustainable rural living, supporting the revival of indigenous values and community resiliency in Sabrang Village, Indonesia. *Land*, 11(9), 1597. <https://doi.org/10.3390/land11091597>
 13. Yudarwati, G. A., & Gregory, A. (2022). Improving government communication and empowering rural communities: Combining public relations and development communication approaches. *Public Relations Review*, 48(3), 102200. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102200>
 14. Zikargae, M. H., Woldearegay, A. G., & Skjerdal, T. (2022). Empowering rural society through non-formal environmental education: An empirical study of environment and forest development community projects in Ethiopia. *Heliyon*, 8(3), e09127. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09127>
- Investigating the keys to the failure of inter-village government collaboration in developing rural economic potentials in Indonesia.* (2024). *Regional Science Policy & Practice*, 16(5), 100023. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100023>